

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Secara geografis wilayah maritim Indonesia dan Filipina adalah laut Sulawesi dan laut Sulu. Kedua laut ini merupakan jalur wilayah maritim yang memiliki nilai strategis dan juga merupakan perairan sangat penting bagi pelayaran niaga Internasional.<sup>1</sup> Sebelumnya perairan ini tidak begitu diperhatikan oleh negara-negara yang berbatasan langsung seperti Malaysia, Filipina dan Indonesia sendiri. Namun seiring munculnya ancaman dari perompakan yang beraktifitas, wilayah perairan kedua negara menjadi jalur yang berbahaya.

Berbahayanya wilayah maritim kedua negara sangat berkaitan dengan kelompok Abu Sayyaf Group (ASG).<sup>2</sup> Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa ASG merupakan kelompok teroris internasional dan kelompok teroris utama di Asia Tenggara yang memiliki keterkaitan dengan *Jemaah Islamiyah* (JI) dan Al-Qaeda. Hingga kini ASG muncul sebagai kelompok teroris yang diperhitungkan sebagai lawan dari pemerintahan Filipina, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya

---

<sup>1</sup> Rizki Roza, *Keamanan Laut Sulawesi - Sulu :Kaji Ulang Kerjasama Trilateral ?*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuals dan Strategis, Vol, X, No, 20, (Oktober 2018), hal 8. Diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-X-20-II-P3DI-Oktober-2018-244.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-20-II-P3DI-Oktober-2018-244.pdf) (09/07/2019.18.17 WIB)

<sup>2</sup> Jaka Haritstyo, 2018, *Kerjasama keamanan Indonesia dengan Filipina dalam menghadapi ancaman kelompok Abu Sayyaf Grup Tahun 2016*, Skripsi, Jakarta : Jurusan Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal.33. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43067/1/JAKA%20HARITSTYO%20P-FISIP.pdf> (17/04/2019.01.39 WIB)

di Asia Tenggara. Lokasi yang menjadi operasi dari kelompok ASG adalah di pulau Basilan dan Kepulauan Sulu terkhusus pada wilayah Jolo dan Tawi-Tawi, Semenanjung Zamboanga di wilayah Barat Mindanao Filipina Selatan dan perairan Lahad Datu, Kinabatangan, Semporna dan Sandakan, Sabah Malaysia.<sup>3</sup>

Sejak tahun 2000 kelompok ini sering melakukan aksinya dengan menggunakan kedua jalur maritim Indonesia dan Filipina. ASG sendiri telah melakukan beberapa kali tindakan penculikan wisatawan di Malaysia dan Filipina. Selain itu ASG juga menenggelamkan kapal Ferry di Manila Bay sekitar bulan Februari tahun 2004.

Atas tindakan tersebut beberapa korban terhitung mencapai 116 orang meninggal dunia. Aksi dari kelompok yang menamakan dirinya ASG ini kemudian semakin berkembang dan mengancam jalur laut Sulu dan Sulawesi. Hal ini dapat dilihat ketika pada tahun 2014, ASG melakukan deklarasi dengan kelompok teroris *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) sehingga menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi Indonesia dan Filipina.<sup>4</sup>

ASG juga melakukan penculikan kepada Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia pada Maret dan April 2016 sebanyak dua kali. Pertama, pada tanggal 15 Maret 2016 Kapal Brahma dan Kapal Tongkang Anand milik Perseroan Terbatas (PT) Antang Gunung Meratus yang membawa 7500 metrik ton lebih batu bara. Kapal dibajak oleh kelompok ASG dalam perjalanan dari Sungai Putting,

---

<sup>3</sup> Dian Gratia Christy, dkk, *Diplomasi Pemerintahan Indonesia dalam Upaya Pembebasan WNI Sandera Abbu Sayyaf Group Tahun 2016*, Surakarta : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional , Universitas Slamet Riyadi Surakarta, hal.2. Diakses dari <https://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/2352/2102> (08/07/2019.19.05 WIB)

<sup>4</sup> Riski Roza, *Op. Cit.*, hal.10

Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kedua pada tanggal 15 April 2016, terdapat dua kapal yang dibajak kembali oleh ASG, kapal tersebut adalah Tunda TB Hendry dan Kapal Tongkak Christy, dalam perjalanan menuju Kota Cebu, Filipina dan kembali menuju Tarakan.<sup>5</sup>

Jalur laut Filipina Selatan dijadikan sebagai sarana kelompok ASG untuk melakukan aksinya. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan angka penculikan di didaerah ini yaitu ada 12 kejadian perompakan. Kemudian di tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu 3 kejadian perompakan. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 2 kejadian perompakan serta pada tahun 2019 juga terdapat 2 kejadian perompakan.<sup>6</sup>

Keamanan wilayah maritim kedua negara (laut Sulawesi dan Sulu) yang merupakan jalur perdagangan internasional tentu sangat tergantung pada sikap atau kepentingan nasional dari negara Indonesia dan Filipina.<sup>7</sup> Sebagai jalur perdagangan maritim yang begitu ramai dilalui oleh kapal-kapal internasional dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara Indonesia dan Filipina, ditambah dengan nilai ekonomis dari sumber daya bahari yang terkandung didalamnya. Tentu mengharuskan kedua negara untuk melakukan proses pengamanan jalur

---

<sup>5</sup> Anis Istkharih, *Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Sandera di Luar Negeri Studi Kasus : Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf Pada Maret-April 2016*, Journal International Relations, Vol, 3, No, 3 (2017), Universitas Diponegoro, hal.1. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/89753-ID-1-diplomasi-indonesia-dalam-pembebasan-s.pdf> (08/07/2019 .20.46 WIB)

<sup>6</sup> ReCAAP ISC, *Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Annual Report January-December 2019*, hal.12. Di akses dari <https://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/ReCAAP%20ISC%20Annual%20Report%202019.pdf> (14/03/2020.21.37 WIB)

<sup>7</sup> Kanis Dursin. *Ancaman Abu Sayyaf : Mengapa Laut Sulu Penting untuk Indonesia ?*. Artikel dalam Rappler. Diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/131543-mengapa-laut-sulu-penting-untuk-indonesia> (17/04/2019.23.37 WIB)

maritimnya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mengelola laut Sulu dan Sulawesi agar terhindar dari ancaman perompakan bersenjata.<sup>8</sup>

Diawali dengan saling kunjung antar pemerintah Indonesia dan Filipina pada tahun 2014. Menjadi bukti dari kedua negara untuk menjalin kerjasama dalam menjawab persoalan maritim. Hasilnya pun terlihat dengan adanya bentuk perjanjian Indonesia dan Filipina yang menandatangani *Joint Statement between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary*, di Bali pada tanggal 10 Oktober 2014.<sup>9</sup>

Perjanjian ini merupakan komitmen bersama dari kedua negara untuk memulai perundingan terkait penentuan batas landas kontinen Indonesia dan Filipina. Saat ini Indonesia dan Filipina melakukan kolaborasi menjaga keamanan maritim di perbatasan melalui *Joint Patrol* dan *Joint Border Committee* (JBC). Selain itu juga, antara Indonesia dan Filipina mempunyai keinginan untuk kembali mengimplementasikan Perjanjian *1975 Border Patrol Agreement* dan Perjanjian kerja sama lintas batas (*Border Crossing Agreement*) 1975.<sup>10</sup>

Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan wilayah yakni, sebagai negara kepulauan. Kedua negara ini juga memiliki masalah yang secara umum dapat dikatakan sama. Salah satunya adalah terdapat aktifitas perompakan bersenjata

---

<sup>8</sup> Tony Firman. *Asia Tenggara Surga Bajak Laut*, Artikel dalam Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/asia-tenggara-surga-bajak-laut-cvXA> (17/04/2019. 23.44 WIB)

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, *Diplomasi Indonesia 2014*, Jakarta: Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 11. Diakses dari <https://ex.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf> (01/04/2020/21.22 WIB)

<sup>10</sup> *Ibid.*

yang berkembang di laut Filipina Selatan sehingga berdampak pada pencapaian kepentingan nasional bagi kedua negara. Hingga pada akhirnya mengharuskan kedua negara ini memberikan perhatian khusus dalam menyelesaikan tindakan perompakan yang merupakan kategori kejahatan transnasional yang terorganisir.

Perompakan bersenjata yang muncul di laut Filipina Selatan sering dikaitkan dengan kelompok Muslim Moro yang dalam sejarahnya adalah kelompok masyarakat Filipina yang mendiami kawasan Filipina di bagian Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya gerakan bangsa Moro menjadi tidak terkontrol sehingga berkeinginan untuk memisahkan diri secara administratif dengan pemerintahan Filipina.<sup>11</sup>

Gerakan bangsa Moro ini kemudian mengalami perubahan gerakan menjadi gerakan semi radikal seperti kelompok ASG yang sering melakukan teror terhadap pemerintah Filipina dan Indonesia. Bentuk teror yang sering dilakukan oleh kelompok ini adalah pembajakan kapal-kapal kargo yang mengangkut barang ekspor dari Indonesia dan juga melakukan penyanderaan warga dari negara lain yang melewati Filipina Selatan di kawasan jalur laut Sulu. Perlu diketahui bahwa wilayah laut Sulu secara geografis merupakan jalur yang memasuki wilayah laut Sulawesi, yang merupakan jalur tengah bagi Indonesia dalam melakukan pengiriman barang ekspor ke negara-negara mitra, seperti Filipina, Jepang, Korea Selatan dan China.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hardi Alunaza SD dan Dewa Anggara, *Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol, 3, No, 1 (Januari-Juni 2018), Pontianak: Universitas Tanjungpura, hal. 53-54. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/20178/13869> (01/04/2020.21.21 WIB)

<sup>12</sup> Kanis Dursin, *Loc. Cit.*

Kepentingan Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan secara umum ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan stabil dalam aspek ekonomi, politik dan sosial – budaya. Serta ingin mendorong penyebaran nilai – nilai dialog dan perdamaian di tingkat internasional.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, bagi kedua negara perompakan di laut Filipina Selatan memiliki dampak yang besar bagi kerjasama bilateral maupun multilateral disegala bidang. Mengingat kawasan Filipina selatan merupakan jalur yang sering dipakai untuk melakukan kegiatan diplomatik demi menjalin kerjasama yang kuat dengan Filipina.

Laut Filipina Selatan merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) kota Davao meliputi Pulau Mindanao, Kepulauan Tawi-Tawi serta Kepulauan Sulu (luas daratan  $\pm$  102.043 km<sup>2</sup> atau 34% dari seluruh luas daratan Filipina). Perbatasan daerah yang masuk dalam KJRI Kota Davao meliputi sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Filipina Tengah (Visayas).

Sebelah Timur dibatasi oleh Samudera Pasifik sampai ke kepulauan Palau, sebelah Selatan dibatasi oleh laut Sulawesi dan Kepulauan Miangas dan Marore Indonesia dan sebelah Barat dengan laut Cina Selatan, Kepulauan Sulu dan Tawi -

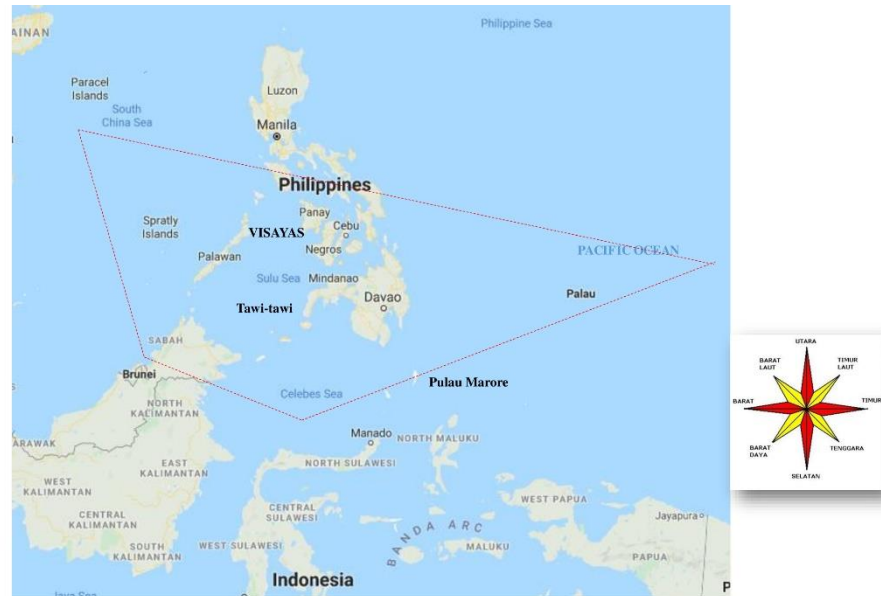
---

<sup>13</sup> Edwin Firdaus. *Indonesia Berkomitmen Ciptakan Perdamaian di Filipina Selatan*. Artikel dalam Tribun News. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/01/07/indonesia-berkomitmen-ciptakan-perdamaian-di-filipina-selatan> (03/11/2018.01.47 WIB)

Tawi (kepulauan yang terbentang dari semenanjung Zambonga, di Mindanao Barat ke arah Sabah, Malaysia serta Kalimantan Timur, Indonesia.<sup>14</sup> (Lihat Gambar 1.1)

**Gambar 1.1** Peta Perbatasan Wilayah Indonesia dengan Filipina Selatan

Sumber : Google Inc, 2019.<sup>15</sup>



Berdasarkan kedekatan wilayah perbatasan tersebut, kedua negara tentu perlu melakukan banyak hal untuk mencapai hubungan bilateral yang baik sehingga terciptanya kondisi wilayah yang aman dan stabil. Adapun hubungan bilateral yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam menjawab persoalan perompakan di laut Filipina Selatan adalah melakukan kerjasama keamanan, pertahanan maupun kerjasama pembangunan.

<sup>14</sup> Ika Nurasma Yanti, *Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina*. Jurnal Jom FISIP, Vol, 2, No, 2 (oktober 2015), Pekanbaru:Universitas Riau, hal. 4. Di akses dalam <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/7395/7072> ( 01/04/2020. 00.33 WIB)

<sup>15</sup> Google Inc. 2019 Gogle Maps, *Peta Wilayah Visayas*. Diakses dari <https://www.google.com/maps/place/Visayas,+Philippines/@7.03213,115.3179219,5z/data=!4m5!3m4!1s0x33a8eba3f807567d:0x9a72fa2280f90e48!8m2!3d11!4d123.5> (01/04/2020.00.33 WIB)

Hal ini menjadi dasar dari upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam menangani permasalahan perompakan ASG di laut Filipina Selatan. Tindakan tersebut dilakukan melalui kerjasama di bidang keamanan yang membahas terkait masalah keamanan di perbatasan Indonesia dan Filipina khususnya wilayah laut Sulu yang menjadi titik perompak ASG beraktifitas.

Maka dari itu, menjadi hal yang menarik untuk di analisa oleh penulis bahwa upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi permasalahan perompakan ASG di laut Filipina Selatan tentu harus terlaksana dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengarah pada latar belakang masalah diatas maka penulis disini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Upaya Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Filipina Dalam Mengatasi Perompakan Abu Sayyaf Group di Laut Filipina Selatan?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan Abu Sayyaf Group di laut Filipina Selatan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis kedepan, yakni sebagai berikut:



#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian teoritis dalam hubungan internasional dan memberikan kontribusi dalam mahasiswa hubungan internasional khususnya dalam topik diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menanggapi aksi perompakan oleh Abu Sayyaf Group di laut Filipina Selatan dengan berdasarkan upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas perompakan Abu Sayyaf Group di laut Filipina Selatan berdasarkan diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina.

#### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan bisa dikatakan masih belum banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi *literatur review* dalam penelitian ini adalah *pertama*, skripsi yang ditulis oleh **Hartati Hi. Arsyad** dalam judul *Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia – Filipina dalam Menangani Illegal Fishing*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hartati Hi. Arsyad, 2015, *Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia – Filipina dalam Menangani Illegal Fishing*, Skripsi, Makassar : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/77622314.pdf> (01/04/2020.00.38WIB)

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama Indonesia – Filipina dalam menangani kasus *Ilegal Fishing* yang terjadi di perbatasan antara kedua negara. Dengan adanya persoalan ini Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan dalam memandang kasus *Ilegal Fishing*, yang pada akhirnya Indonesia dan Filipina mendapatkan peluang dan tantangan untuk melakukan kerjasama bilateral.

Peluang Indonesia dan Filipina terlihat pada adanya kerjasama *Joint Venture*, terbentuknya pelabuhan penimbangan ikan di wilayah timur Indonesia dan *Vessel Monitoring System*, yang dapat memberikan peluang terhadap Indonesia dan Filipina di aspek ekonominya dan sistem keamanan. Peluang tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan daerah pesisir maupun daerah pelabuhan, kemudian peluang adanya modernisasi sistem pengawasan melalui teknologi.

Selanjutnya tantangan Indonesia dan Filipina dalam melakukan kerjasama bilateral dapat dilihat dari adanya *Memorandum of Understanding* yang telah jatuh tempo sejak 2011. Nelayan Indonesia dan Filipina masih terindikasi melakukan jual/beli di wilayah *crossing area* yang tidak dapat dipantau secara akurat, penyebab *crossing area* ini terletak pada harga jual ikan di General Santos, Filipina lebih tinggi dibandingkan dijual di Indonesia.

Adanya modus pengusaha Filipina yang memberikan bantuan kepada nelayan Indonesia untuk mempermudah penjualan ikan di daerah perbatasan kedua negara. Terbatasnya kapal patroli yang dimiliki Indonesia dalam menjaga laut Indonesia yang berdampak langsung pada hari operasi yang masih sangat terbatas. Sedikitnya pengawasan dari petugas, kurangnya fasilitas serta kapal patroli adalah

tantangan yang di hadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari praktek *Illegal fishing*.

Berangkat dari hasil penelitian diatas penulis melihat adanya perbedaan fokus dengan penelitian yang akan di analisis. Perbedaan tersebut terletak pada upaya diplomasi Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan yang merupakan fokus dari penulis sedangkan peneliti diatas memfokuskan penelitiannya di aspek peluang dan tantangan kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *Illegal fishing*.

Studi terdahulu *kedua* yang menjadi bahan *literatur review* dalam penelitian ini adalah skripsi yang di tulis oleh **Jaka Haritstyo P.** dalam judul ***Kerjasama Keamanan Indonesia dengan Filipina dalam menghadapi Ancaman Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2016***.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas kepentingan Indonesia dan Filipina dalam kerjasama keamanan menghadapi ancaman ASG tahun 2016. Banyaknya kasus penculikan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh ASG terhadap warga negara Indonesia membuat Indonesia bekerjasama dengan Filipina untuk melepaskan sandera yang diculik. Selain itu, meningkatnya kasus penculikan yang dilakukan oleh kelompok ASG di perairan laut Sulu sehingga Indonesia mendorong negara yang berada di sekitar perairan tersebut untuk melakukan kerjasama keamanan maritim.

Penulis dalam melihat skripsi diatas terdapat hal yang membedakan dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitian. Adapun yang membedakan dengan penelitian diatas adalah lebih mendeskripsikan kepentingan Indonesia dan

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*

Filipina dalam mengatasi keamanan maritim dengan studi kasus pembajakan ASG di perairan Sulu sedangkan penulis disini lebih menekankan pendeskripsian pada upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan.

Kajian terdahulu ketiga adalah jurnal ilmu sosial ilmu politik (JOM-FISIP) yang ditulis oleh M. Herry Misya dalam judul Efektivitas Joint Press Statement dalam menanggulangi ancaman Abu Sayyaf di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang mengangkat salah satu aspek kerjasama internasional dalam menanggulangi salah satu kejahatan transnasional diperbatasan Indonesia dan Filipina.

Penelitian ini terutama mengangkat pelaksanaan *Joint Press Statement* yang melibatkan dua negara pantai yaitu Indonesia dan Filipina untuk merealisasikan pertemuan ke 3 dari *Memorandum of Understanding on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang dibentuk tahun 1993 antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina. Pelaksanaan *Joint Press Statement* ditanda tangani pada 21 juni 2005 di Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan yang terjadi diperbatasan antara Indonesia dan Filipina.

Kehadiran ASG yang beroperasi tampaknya menjadi sorotan bagaimana tidak amannya jalur maritim. Adanya batas maritim antara Indonesia dan Filipina adalah salah satu faktor kurangnya keamanan pada perbatasan kedua negara

---

<sup>18</sup> M. Herry Misya, *Efektivitas Joint Press Statement dalam menanggulangi ancaman Abu Sayyaf di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina*, Jurnal JOM – FISIP, Vol, 4, No, 2, (Oktober 2017), Pekanbaru: Universitas Riau. Di akses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/16311/15778> (01/04/2020.00.46 WIB)

sehingga berdampak pada meningkatkan kejahatan pada wilayah perbatasan tersebut. Kerjasama dari kedua negara ini mengantarkan kedua negara ke dalam suatu hubungan yang baik.

Sehingga menyebabkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara, termasuk dalam hal keamanan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, serta kerjasama dibidang yang lainnya. Oleh karena itu peneliti disini melihat perbedaan penelitian terletak pada konsep yang digunakan dan analisa dari penelitian yang lebih menitikberatkan pada efesiensi kerjasama Filipina dan Indonesia dalam *Joint Press Statement* untuk menanggulangi permasalahan kelompok ASG sebagai kelompok terorisme.

Penelitian terdahulu *keempat* yang diambil oleh peneliti adalah jurnal yang di tulis oleh *Adisty Larasati* dengan judul ***Kerjasama Keamanan Indonesia - Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011***.<sup>19</sup> dalam penelitian ini lebih memahami mengapa Indonesia dan Filipina ingin bekerja sama tentang keamanan dan terorisme pada tahun 2005-2011. Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang memiliki begitu banyak insiden dari aksi terorisme, dan kedua negara memiliki kondisi tidak stabil yang sama yang membuat kedua negara rentan terhadap isu terorisme.

Penelitian ini dijelaskan pula tentang apa saja faktor yang membuat kedua negara bekerja sama dalam menanggulangi terorisme. Selain itu juga dijelaskan tentang adanya hubungan antara *Jemaah Islamiyah* dan Front Pembebasan Islam

---

<sup>19</sup> Adisty Larasati, *Kerjasama Keamanan Indonesia - Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005 - 2011*, Jurnal JOM-FISIP, Vol, 2, No, 1 (Februari 2015), Pekanbaru: Universitas Riau. Di akses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/4969/4851> (01/04/2020.00.40 WIB)

Moro (MILF) yang menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat kuat bagi kedua negara untuk bekerjasama dalam menanggulangi terorisme. Hal terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum internasional yang dibuat oleh kedua negara untuk kerjasama keamanan dalam menanggulangi terorisme.

Penelitian ini secara teoritis telah dibangun dengan perspektif neoliberalisme pada hubungan internasional dan didukung oleh kerjasama internasional, dan teori keamanan internasional, dan juga konsep keamanan non-tradisional. Perumusan seluruh argumen, fakta, serta kerangka teoritis dalam penelitian ini berdasarkan metode penjelasan kualitatif. Teknik dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Data yang didapat dan dikumpulkan melalui buku-buku jurnal, tesis terakhir dan kemudian dari internet telah terkait dengan masalah.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dan Filipina untuk bekerja sama tentang keamanan dan terorisme pada tahun 2005-2011 adalah hubungan kuat yang mengikat kelompok teroris di Indonesia dan kelompok teroris di Filipina. Dengan kerjasama yang dibuat oleh kedua negara, dapat membuat hubungan yang kuat antara kelompok teroris dari kedua negara dapat pergi dan kedua negara dapat membuat stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan peneliti yang akan dibahas adalah pendekatan yang digunakan dan fokus dari pembahasan yang lebih menjelaskan hubungan Filipina dan Indonesia dalam menanggulangi persoalan terorisme. Sedangkan penulis disini lebih kepada titik diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina yang menjadi upaya untuk mengatasi perompakan ASG di Filipina Selatan.

Studi terdahulu yang *kelima* adalah Jurnal yang di tulis oleh **Ismah Rustam** dengan judul ***Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu***.<sup>20</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada perairan Laut Sulawesi – Laut Sulu yang dihadapkan dengan permasalahan kejahatan seperti penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski ketiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) telah melakukan patroli bersama namun angka kejahatan di perairan ini masih tergolong tinggi.

Penelitian ini melakukan pendekatan seperti pembentukan kerjasama trilateral. Pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik serta membentuk kerjasama yang mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial yang besar di wilayah tersebut harus memelopori tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara ketiga negara.

Seperti Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan perairan ini termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai kebijakan yang di buat di Selat Malaka sehingga berdampak pada penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di kawasan perbatasan perairan ini belum terdapat kebijakan yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Jurnal diatas terdapat beberapa pembahasan yang hampir memiliki kesamaan diaspek ruang lingkup pembahasan yang lebih mengarah pada persoalan maritim. Namun, penulis jurnal disini lebih meneliti kebijakan yang dikeluarkan

---

<sup>20</sup> Ismah Rustam, *Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu*, Jurnal Penelitian Politik, vol, 14, No, 2, (Desember 2017), Jakarta - Mataram: Universitas Mataram. Diakses dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/717/496> (04/01/2020.00.54 WIB)

oleh pemerintah Indonesia dengan pendekatan diplomatik sehingga membentuk kerjasama multilateral. Berbeda dengan penelitian yang akan dianalisa oleh penulis sekarang yang ingin melihat upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan.

**Tabel 1.1** Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	<i>Peluang Dan Tantangan Kerjasama Indonesia - Filipina Dalam Menangani Illegal Fishing</i> Oleh : Hartati HI Arsyad	Deskriptif Kerangka Konseptual yang digunakan yaitu : Kepentingan Nasional, Kerjasama Bilateral, dan Kejahatan Transnasional	Indonesia – Filipina membangun sistem pengawasan seperti <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS) yang berbasis pada sistem pengawasan modern. Membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan penimbangan ikan internasional di Bitung, dan investasi pasar internasional yang berkelanjutan. Tantangan berupa modus <i>Illegal Fishing</i> kedua negara yang sulit diidentifikasi dan kurangnya armada kapal patroli pengawasan perairan kedua negara.
2.	<i>Kerjasama Keamanan Indonesia dengan Filipina dalam menghadapi Ancaman Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2016.</i> Oleh : Jaka Haritstyo P.	Kualitatif Kerangka Konseptual yang digunakan adalah : Konsep Kepentingan Nasional, Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep Terorisme	Lahirnya kerjasama keamanan trilateral yang dibentuk oleh Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Keberadaan kerjasama keamanan di Laut Sulu sendiri memberikan keuntungan tersendiri bagi kepentingan Indonesia dan Filipina, khususnya dalam kerjasama BIMP-EAGA Bagi Indonesia, Laut Sulu yang lebih aman dari ancaman kelompok Abu Sayyaf setelah keberadaan kerjasama keamanan membuat potensi baru untuk meningkatkan pembangunan di wilayah utara dari Indonesia.
3	<i>Efektivitas Joint Press Statement</i>	Deskriptif	Terbagunnya komitmen antara Indonesia dan Filipina untuk



	<p><i>Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia -Filipina.</i></p> <p>Oleh : M. Herry Misya</p>	<p>Kerangka Konseptual yang digunakan adalah : Konsep Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>) dan Teori Kerjasama Internasional</p>	<p>mengamankan wilayah perbatasan kedua negara.</p> <p>Komitmen tersebut dimulai dengan intensitas pertemuan pemerintah Indonesia dan Filipina meningkat terkhusus dalam membahas atau merespon ancaman dari Abu Sayyaf.</p> <p><i>Joint Press Statement</i> memiliki efek yang baik untuk kedua negara dalam meminimalisir terjadinya perluasan gerakan dari kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Indonesia dan Filipina</p>
4	<p><i>Kerjasama Keamanan Indonesia - Filipina Dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011.</i></p> <p>Oleh : Adisty Larasati.</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Kerangka Konseptual yang digunakan adalah : Konsep Keamanan Non-Tradisional, Kerjasama Internasional dan Teori Keamanan Internasional</p>	<p>Lahirnya dideklarasikan pada 21 Juni 2005 di Manila, dimana dalam deklarasi ini kedua negara sepakat untuk menumpas segala bentuk kejahatan <i>transnational crime</i> maupun <i>counter terrorism</i>. Deklarasi tersebut lahir atas kerjasama dalam bentuk dinas kepolisian antara Indonesia dan Filipina.</p> <p>Kesepakatan kerjasama dalam bidang keamanan, dalam bentuk Nota Kesepahaman antar dinas kepolisian yang ditandatangani pada 18 November 2005.</p>
5	<p><i>Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi - Laut Sulu</i></p> <p>Oleh : Ismah Rustam</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Kerangka konseptual yang digunakan adalah : Konsep Diplomasi dan Rezim Internasional dan Keamanan Maritim</p>	<p>Adanya pertemuan <i>Trilateral Defence Minister</i> antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina telah berlangsung sebanyak tiga kali.</p> <p>Adanya <i>Framework of Arrangement (FoA) mengenai Standart Operating Procedure (SOP)</i> untuk pelaksanaan kerja sama dalam patroli bersama ketiga negara yang rencananya mulai diimplementasikan tahun 2017.</p> <p>Terbentuknya <i>Trilateral Maritime Patrol Indomalphi</i> yang diresmikan pada Juni 2017 oleh Menteri Pertahanan ketiga negara</p>

			yakni Ryamizard Ryacudu (Indonesia), Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein (Malaysia) dan Delvin N Lorenzana (Filipina).
6	<i>Upaya Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Filipina dalam Mengatasi Perompakan Abu Sayyaf Group di Laut Filipina Selatan.</i> Oleh : Muh. Junon Ode	Deskriptif Kerangka Konseptual yang digunakan adalah : Konsep Diplomasi Maritim	Menjalankan kerjasama maritim dengan menggunakan doktrin keamanan maritim. Kerjasama yang dilakukan menggunakan proses penjagaan wilayah perbatasan di kedua negara. (Laut Sulawesi dan Laut Sulu)

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Konsep Diplomasi Maritim

Penulis dalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep diplomasi maritim yang digambarkan oleh Christian Le Mière dalam bukunya dengan judul *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*.<sup>21</sup> Menurut Le Miere, diplomasi maritim diartikan sebagai upaya mengelolah atau mengatur hubungan internasional menggunakan aset maritim atau hal lain yang berkaitan dengan maritim.<sup>22</sup>

Le Miere menjelaskan bahwa dalam diplomasi maritim terdapat aktor yang terlibat yakni, angkatan laut, penjaga pantai dan pasukan militer, serta aktor lain yang memungkinkan terlibat dalam membangun hubungan internasional terutama mengenai keamanan maritim secara universal.<sup>23</sup> Lebih khusus lagi Le Miere

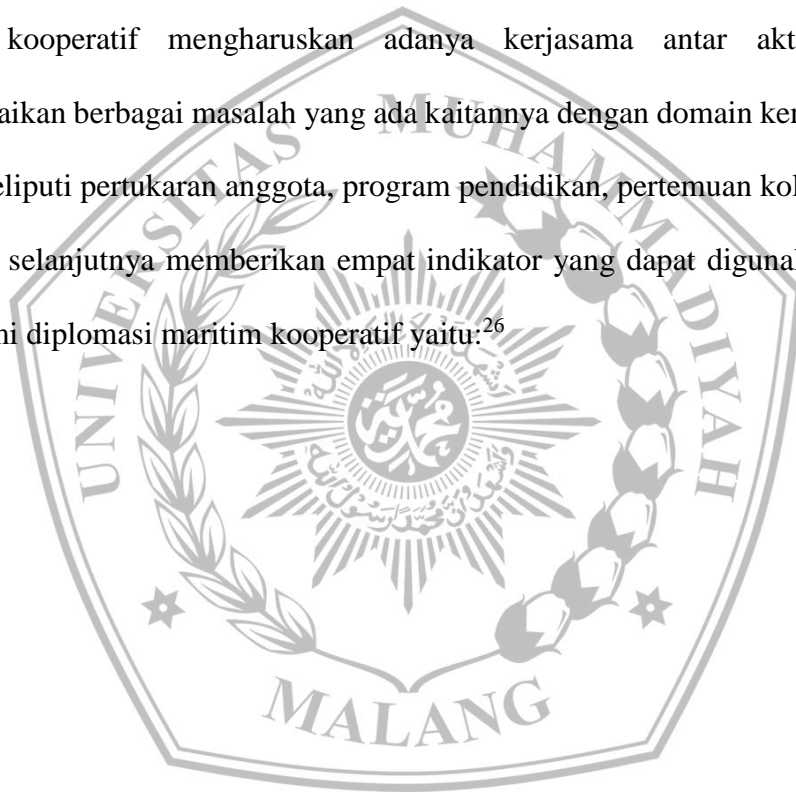
<sup>21</sup> Christian Le Miere, 2014, *Maritime Diplomacy in the 21<sup>st</sup> Century: Drivers and Challenges*, United Kingdom: Routledge, hal. 1. Di akses dari <https://www.book2look.com/embed/9781134117536> (01/04/2020/00.59 WIB)

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 27

menyebutkan bahwa ada tiga bentuk dalam diplomasi maritim yaitu, diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif.<sup>24</sup>

Le Miere menjelaskan bahwa diplomasi maritim kooperatif merupakan upaya negara untuk mendukung aktifitas berbagai aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan negara lain. Tujuannya adalah membangun koalisi, menarik perhatian dan membangun pengaruh positif terhadap negara lain. Diplomasi maritim kooperatif mengharuskan adanya kerjasama antar aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada kaitannya dengan domain kemaritiman, hal ini meliputi pertukaran anggota, program pendidikan, pertemuan kolaboratif.<sup>25</sup> Le Miere selanjutnya memberikan empat indikator yang dapat digunakan dalam memahami diplomasi maritim kooperatif yaitu:<sup>26</sup>



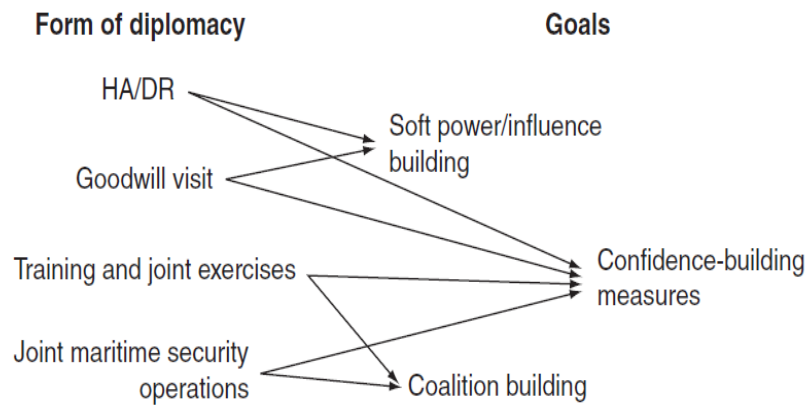
---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 7

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 7-11

**Gambar 1.2** Tahap Diplomasi Maritim Kooperatif dan Tujuannya.<sup>27</sup>



#### 1. Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR)

*Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR)* merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara dalam memberikan suatu bantuan kemanusiaan serta bantuan bencana. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor yang berhubungan dengan aspek kemaritiman. Seperti keterlibatan perangkat militer yang menggunakan kapal angkatan laut dalam mengirimkan suatu bantuan kemanusiaan ke negara lain. Aktivitas ini bertujuan untuk menaruh pengaruh di negara tujuan (*soft power*), selain itu bertujuan untuk saling membangun pengaruh antar negara (*Influence building*) yang melakukan diplomasi maritim kooperatif.

Sebagai contoh, pada tahun 2004 ketika bencana tsunami di Aceh, Angkatan Laut Australia ikut terlibat dalam memberikan bantuan kepada korban bencana tsunami, Angkatan Laut Australia bersama TNI ikut terlibat dalam membantu korban tsunami.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 9

Upaya dari Australia dengan ikut terlibat membantu Indonesia dalam bencana alam bisa dikatakan sebagai tindakan untuk membangun pengaruh serta kepercayaan antar negara, mengingat keluarnya Timor-Timor dari Indonesia pada saat itu, memiliki hubungan dengan Australia sehingga membawa citra negatif bagi Australia.<sup>28</sup>

## 2. Goodwill Visit

*Goodwill Visit* merupakan upaya diplomasi maritim kooperatif yang dalam tindakannya suatu negara berkunjung ke negara lain atas dasar keinginan baik. *Goodwill Visit* ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih erat antar negara terkait, selanjutnya *Goodwill Visit* juga bertujuan untuk melakukan aktifitas berupa pertemuan untuk membahas suatu kerjasama dan melakukan aktifitas latihan militer bersama.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan *Goodwill Visit*, sebagai contohnya Indonesia menerima kunjungan dari Amerika Serikat pada tahun 2011. Kunjungan Amerika dengan mendatangkan kapal perang *US Navy Ships Task Group 73.1* bertujuan untuk melakukan program latihan bersama yang telah disepakati dalam *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2011*. Kunjungan ini disebut sebagai upaya mempererat hubungan antar Indonesia dan Amerika Serikat serta sebagai keinginan baik dari Amerika untuk Indonesia, dalam hal kerjasama keamanan dan pertahanan khususnya di wilayah maritim.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 7-11

<sup>30</sup> Kartika Candra, *Kapal Perang 3 Negara Merapat di Tanjung Priok*, Artikel dalam Tempo. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/336646/kapal-perang-3-negara-merapat-di-tanjung-priok/full&view=ok> (12/05/2019. 23.31 WIB)

### 3. Training and Joint Exercise

*Training and Joint Exercise* merupakan indikator diplomasi maritim kooperatif yang dilakukan oleh suatu negara bersama negara lain dalam mengadakan latihan militer secara bersama. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan bersama antar negara (*Confidence-building measures*). Selain itu juga bertujuan menghilangkan rasa kecurigaan antar negara, mendukung aliansi antar negara melalui pembangunan kapasitas angkatan laut dan mendukung kekuatan militer yang terlihat rendah sehingga dapat tercipta (*Coalition building*).<sup>31</sup>

Sebagai contoh, latihan militer bersama antara Indonesia dan Thailand pada tahun 2017 dalam *Sea Garuda 19AB-17*. Latihan bersama yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI-AL) dan *Royal Thai Navy* (RTN) bertujuan untuk membangun kerjasama pertahanan antar negara. Latihan militer Indonesia - Thailand dengan sandi *Sea Garuda 19AB-17* memiliki visi besar yakni, kedua negara harus mampu menjawab tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.

Perubahan ancaman keamanan maritim dari tradisional ke non tradisional mengharuskan Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama militer untuk menjawab tantangan tersebut. Selain itu latihan militer bersama dari kedua negara bertujuan untuk membangun kekompakan yang mampu memberikan pengalaman serta pengetahuan dalam hal taktik dan strategi pengamanan di wilayah maritim.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Christian Le Miere, Op.Cit., hal. 9

<sup>32</sup> Adeng Septi Irawan, *Gandeng TNI Angkatan Laut Thailand, Koarmatim Gelar Latihan Gabungan*. Artikel dalam Tribun Jatim. Diakses dari

#### 4. Joint Maritime Security Operations

*Joint Maritime Security Operations* merupakan upaya operasi bersama suatu negara dengan negara lain. Dalam konteks ini operasi bersama lebih diarahkan dalam kolaborasi membangun keamanan maritim. Oleh karena itu, *Joint Maritime Security Operations* mengisyaratkan suatu tujuan bersama yakni, dapat membangun kemampuan maritim antar negara, memperkuat pertahanan wilayah maritim, menghilangkan rasa saling curiga antar negara, serta dapat mendukung suatu aliansi antar negara atau *Coalition building*.<sup>33</sup>

Sebagai contoh, Indonesia, Malaysia dan Singapura telah berkolaborasi untuk membangun kerjasama keamanan maritim di wilayah Selat Malaka. Upaya ini dilakukan untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman kejahatan transnasional seperti perompakan bersenjata dll.<sup>34</sup>

Diplomasi maritim persuasif merupakan upaya membangun kepercayaan dan pengaruh terhadap negara lain dengan tujuan membangun pengakuan kekuatan maritim yang dapat meningkatkan *bargaining position* di kanca internasional. Hal ini, lebih di kenal dengan istilah “*showing the flag*”, yakni mengumpulkan unsur-unsur kekuatan maritim dengan menunjukkan bendera negara terkait kepada negara lain. Sederhananya *showing the flag* digunakan sebagai penanda untuk

---

<https://jatim.tribunnews.com/2017/08/03/gandeng-tni-angkatan-laut-thailand-koarmatim-gelar-latihan-gabungan?page=1> (12/12/2019. 14.31 WIB)

<sup>33</sup> Christian Le Miere, *Op.Cit.*

<sup>34</sup> Sabella Ardimasari Aldebaran, *Upaya Littoral States (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan User States dalam memberantas kejahatan Armed Robbery (Perompakan Bersenjata) di Selat Malaka Tahun 2008 – 2013*, Journal of International Relations, Vol,2,No,2 (2016), Universitas Diponegoro: Program Studi Hubungan Internasional. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/135397-ID-8-upaya-littoral-states-indonesia-malays.pdf> (12/12/2019. 19.00 WIB)

mempengaruhi kebijakan nasional negara lain. Hal ini juga dapat disebut sebagai tindakan dalam menunjukan kekuatan maritim di wilayah kedaulatan maritim.

Contoh dari diplomasi maritim persuasif adalah pada saat Amerika di pimpin oleh Presiden Theodore Roosevelt, dimana pada saat itu Roosevelt mengeluarkan kebijakan operasi “*Great White Fleet*” yang dimulai pada Desember 1907 hingga Februari 1909. Kebijakan ini merupakan pelayaran keliling dunia yang dilakukan oleh dua skuadron *battleships* dan kapal perang pengawal Amerika Serikat. Kapal yang digunakan ini sebelum berlayar telah di cat putih dengan maksud pemerintah Amerika Serikat ingin menunjukan rasa cinta damai terhadap dunia, selain itu Amerika juga ingin menunjukkan kemampuannya dalam menjangkau seluruh dunia.<sup>35</sup>

Diplomasi maritim koersif merupakan bentuk terbaru dari diplomasi kapal meriam, yaitu diplomasi yang menggunakan kekuatan dari kapal angkatan laut untuk mencapai tujuan politik. Diplomasi maritim ini menggunakan perangkat-perangkat kekuatan militer untuk mengamankan wilayah maritim. Perangkat – perangkat kekuatan militer yang dimaksud adalah angkatan laut, penjaga pantai dan semua unsur yang berkaitan untuk meningkatkan kekuatan maritim.

Contoh dalam diplomasi maritim koersif adalah kejadian pada tahun 1876, Jepang mengirimkan kapal perang Unyo ke pulau Ganghwa di Korea lalu menyerang dua pelabuhan Korea. Akibat dari serangan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut “*Treaty Of Ganghwa*”. Dalam perjanjian ini tiga wilayah di Korea yaitu Busan, Inchon dan Wusan, menjadi wilayah yang bebas

---

<sup>35</sup> Christian Le Miere, *Op.Cit.* hal. 12-13



digunakan oleh warga negara Jepang untuk tinggal dan melakukan aktifitas perdagangan.<sup>36</sup>

Sejalan dengan penjelasan konsep diatas, maka penulis menggunakan dua dari tiga kategori diplomasi maritim yang telah dikemukakan oleh Le Miere. Tujuannya untuk melihat upaya Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan. Kategori diplomasi maritim tersebut adalah, diplomasi maritim kooperatif dengan empat indikator penjelas (humanitarian assistance/disaster relief, goodwill visit, training and joint exercise dan joint maritime security operations) dan diplomasi maritim persuasif.

Dua kategori diplomasi maritim dipilih karena terdapat peningkatan aktifitas maritim Indonesia terhadap Filipina dalam aspek kerjasama keamanan dan perdagangan pada rentang tahun 2014 – 2019. Selain itu, adanya aktifitas perompakan ASG di wilayah maritim Indonesia dan Filipina menjadi alasan kedua. Sebab, dalam upaya meminimalisir aksi perompakan ASG Indonesia dan Filipina lebih menggunakan pendekatan yang bersifat kooperatif dan persuasif. Hal ini tentu sangat relevan dengan konsep diplomasi maritim menurut Le Miere.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang menelaah fenomena sosial yang berlangsung secara empiris atau ilmiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratories

---

<sup>36</sup> Christian Le Miere, *Op.Cit.*, hal.14-15

sifatnya (tidak bersifat angka) dengan menggunakan model atau pendekatan studi kasus.<sup>37</sup>

Studi kasus merupakan uraian serta penjelasan komprehensif tentang berbagai aspek seorang individu, kelompok, organisasi (komunitas), program atau situasi sosial. Studi kasus merupakan penilaian yang sebagian besar atau seluruh aspek – aspek potensial dari unit (kasus) yang dibatasi secara jelas. Sementara desain studi kasusnya menggunakan desain studi kasus tunggal dimana kasus tersebut menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik.<sup>38</sup>

### **1.6.2 Metode Analisis**

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara induksi yaitu tahap awal dalam pelaksanaan penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh latar belakang, hasil analisis ilmiah yang diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan, saran dan kesimpulan akhir. Mencari fakta-fakta yang beragam, kemudian ditelaah dan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.<sup>39</sup>

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, umumnya data bersifat dokumen tertulis, teknik ini juga dikenal studi dokumen atau *literature study*,<sup>40</sup> yang bisa diperoleh melalui perpustakaan, surat kabar, buku,

---

<sup>37</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Jawa barat : Jejak, hal. 11

<sup>38</sup> Rulam Ahmadi, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Ar-Ruzz Media, hal. 69

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>40</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian sosial dan hukum*, Jakarta: Granit., hal 61

majalah serta dokumen lainnya untuk data yang dikumpulkan bersifat sekunder, termasuk juga informasi dari situs internet.

#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **a. Batasan Materi**

Batasan materi penelitian ini dimulai dari perhatian Indonesia terhadap Filipina melalui diplomasi maritim sebagai upaya mengatasi permasalahan perompakan ASG di laut Filipina Selatan yang meluas menggunakan perbatasan jalur maritim antara Indonesia dan Filipina.

##### **b. Batasan Waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2014 sampai 2019, sejak maraknya kasus perompakan di wilayah perbatasan maritim Indonesia – Filipina. Sehingga diperlukan upaya diplomasi maritim kedua negara sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

#### **1.7 Argumen Pokok**

Upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan Abu Sayyaf Group di laut Filipina Selatan tidak hanya sebatas melalui forum-forum bilateral maupun regional dan hanya melahirkan beberapa perjanjian yang fokus membahas kemananan maritim saja. Namun, ada proses mendalam sebagai tindakan konkrit untuk mengatasi perompakan ASG yang berjalan dalam bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina di laut Filipina Selatan.

Jika ditelaah menggunakan konsep diplomasi maritim upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan sebenarnya terletak pada keinginan kedua negara yang berusaha

membangun kondisi aman di wilayah perbatasan. Sehingga, tidak memunculkan ancaman bagi pencapaian kepentingan nasional dari kedua negara. Upaya yang dilakukan pun terlihat pada adanya aktifitas penjagaan wilayah perbatasan di kedua negara dengan melakukan diplomasi maritim kooperatif.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan. Oleh sebab itu, peneliti akan memberikan sistematika penulisan untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan pembahasan dalam menganalisa serta memudahkan peneliti untuk memahami alur pembahasan di setiap bab. Maka, materi-materi yang tertera dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dan juga sub-sub yang dilampirkan di bawah ini.

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	Latar Belakang
	Rumusan Masalah
	Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	Penelitian Terdahulu
	Kerangka Konseptual
	1.5.1 Konsep Diplomasi Maritim
1.6	Metodologi Penelitian
	1.6.1 Jenis Penelitian
	1.6.2 Metode Analisa
	1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
	1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.7	Argumen Pokok
1.8	Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>ANCAMAN PEROMPAKAN ABU SAYYAF GROUP DI WILAYAH MARITIM INDONESIA DAN FILIPINA</b>
2.1	Perkembangan Perompakan Abu Sayyaf Group di Wilayah Maritim Indonesia dan Filipina
2.2	Perompakan Abu Sayyaf Group Sebagai Ancaman Bagi Indonesia dan Filipina
2.3	Upaya Indonesia dalam Mengatasi Perompakan Abu Sayyaf Group
2.4	Upaya Filipina dalam Mengatasi Perompakan Abu Sayyaf Group
<b>BAB III</b>	<b>DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP FILIPINA DALAM MENGATASI PEROMPAKAN ABU SAYYAF GROUP DI LAUT FILIPINA SELATAN</b>
3.1	Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia Terhadap Filipina
	3.1.1 <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR)</i>
	3.1.2 <i>Goodwill Visit</i>
	3.1.3 <i>Training and Join Exercises</i>
	3.1.4 <i>Join Maritime Security Operation</i>
3.2	Diplomasi Maritim Persuasif Indonesia Terhadap Filipina
3.3	Analisis Upaya Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Filipina
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
4.1	Kesimpulan
4.2	Saran